

ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN IZIN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK OLEH MOTOR BANDONG

(Studi Kasus Di Kabupaten Sintang)

OLEH :

MARWANDY, S.Psi.

A2021141061

ABSTRACT

This thesis discusses the analysis of socio-juridical on violation permit the transport of fuel oil by the motor bandong (a case study in Sintang). The method used in this study is a socio-juridical approach. From the results of this thesis can be concluded that the licensing procedure the transport of fuel oil according to the Regulation of the Minister of Energy and cracked Mineral Resources No. 0007 of 2005 regarding Requirements and Guidelines on Technical Implementation Business License In the Downstream Oil and Gas in relation to getting a business license which is the body businesses must apply to the Minister of Energy and Mineral Resources) through the Director-General (whose duties and responsibilities include the business activities of oil and natural gas) are equipped with administrative and technical requirements. That in practice the field associated with the implementation of the application of the rules on consent for the transport of fuel oil by the motor bandong Sintang is still plenty of motors bandong that only licensed carriage of goods and passengers, from 67 motors bandong operating in Sintang, only 3 motors bandong who has the permission of transportation fuel by the Minister of Energy and Mineral Resources cracked No. 0007 of 2005 regarding Implementation Technical Requirements and Guidelines on Business licenses In the Downstream Oil and Gas. For it is worth serious attention from the government, the central government and local governments, as well as the involvement of law enforcement agencies to prevent criminal acts in connection with the permission of transportation fuel oil. The efforts made by law enforcement that the police in this case the local government transportation agencies in tackling violations Sintang permit the transport of fuel oil by the motor bandong In Sintang is through preventive and repressive actions. Preventive measures are intended to prevent the illegal distribution by the motor fuel bandong through the river in Sintang, which among others is done by following up SKB Pertamina and the National Police Headquarters No. Pol. KEP / 34 / VII / 2004 and No. KPTS-035 / C00000 / 2004-S0, in cooperation with the Department of Transportation Sintang in monitoring the implementation of the distribution of fuel is carried out by agents of the fuel and entrepreneurs transport water designated to distribute the fuel in Sintang , follow up orders police chief to monitor the distribution of kerosene, and set up outposts monitoring of fuel distribution in each village through which the motor bandong. Repressive actions carried out by way of prosecution of illegal distribution of kerosene and interrogate suspected offenders were illegally petroleum distribution Undang- as stipulated in Law No. 22 of 2001 and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources cracked No. 0007 of 2005 regarding Requirements and Guidelines technical Implementation Business License In the Downstream Oil and Gas.

Keywords: Juridical-Sociological Analysis, Against Violation Permit, Transportation of fuel oil.

ABSTRAK

Tesis ini membahas analisis yuridis-sosiologis terhadap pelanggaran izin pengangkutan bahan bakar minyak oleh motor bandong (studi kasus di Kabupaten Sintang). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa prosedur perizinan pengangkutan bahan bakar minyak menurut Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi dalam kaitannya untuk mendapatkan izin usaha yaitu badan usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) melalui Direktur Jenderal (yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi) dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis. Bahwa di dalam prakteknya dilapangan terkait dengan pelaksanaan penerapan peraturan tentang perizinan pengangkutan bahan bakar minyak oleh motor bandong di Kabupaten Sintang adalah masih banyak motor-motor

bandong yang hanya memiliki izin pengangkutan barang dan penumpang saja, dari 67 motor bandong yang beroperasi di Kabupaten Sintang, hanya 3 motor bandong saja yang memiliki izin pengangkutan BBM berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi. Untuk itu Perlu perhatian yang serius dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta keterlibatan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam kaitannya dengan izin pengangkutan Bahan Bakar Minyak. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu kepolisian pemerintah daerah dalam hal ini dinas perhubungan Kabupaten Sintang dalam menanggulangi pelanggaran izin pengangkutan bahan bakar minyak oleh motor bandong Di Kabupaten Sintang adalah melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya distribusi BBM secara illegal oleh motor bandong melalui sungai di Kabupaten Sintang, yang antara lain dilakukan dengan cara menindaklanjuti SKB Pertamina dan Mabes Polri No. Pol. KEP/34/VII/2004 dan Nomor KPTS-035/C00000/2004-S0, melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dalam memantau pelaksanaan pendistribusian BBM yang dilakukan oleh agen-agen BBM dan pengusaha transportasi air yang ditunjuk untuk menyalurkan BBM di Kabupaten Sintang, menindaklanjuti perintah Kapolda untuk ikut memantau pendistribusian minyak tanah bersubsidi, dan mendirikan pos-pos pemantau distribusi BBM di setiap desa yang dilalui oleh motor bandong. Tindakan represif dilakukan dengan cara menindak pelaku distribusi minyak tanah secara illegal dan melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku distribusi minyak tanah secara illegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi .

Kata Kunci: Analisis Yuridis-Sosiologis, Terhadap Pelanggaran Izin, Pengangkutan Bahan Bakar Minyak.

Latar Belakang

Transportasi sebagai urat nadi kehidupan sangat dituntut dalam peranannya dalam roda pembangunan negara. Pada dasarnya fungsi dari sistem transportasi beserta sarana dan fasilitasnya adalah sebagai elemen yang menghubungkan titik-titik yang terpisah di dalam ruang dengan berbagai mekanisme yang terdapat di dalamnya.

Kalimantan Barat yang berpenduduk 3,27 juta jiwa menempati wilayah seluas 146.807 km² mempunyai kepadatan rata-rata 25 jiwa/kilometer persegi. Propinsi Seribu Sungai ini sangat didominasi dengan transportasi airnya didukung keberadaan sungai-sungai besar di propinsi tersebut. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis Propinsi Kalimantan Barat yang mempunyai ratusan sungai yang sangat besar dan kecil diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan. Sungai besar utama adalah Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia yaitu 1.806 km yang mana sepanjang 942 km dapat dilayari.

Wilayah Kalimantan Barat banyak dialiri sungai dan anak sungai, hal ini yang menyebabkan angkutan sungai dapat menjangkau ke tempat-tempat yang relatif jauh dari pusat kota. Karena itu pula angkutan sungai/danau/pedalaman sangat penting perannya untuk menjamin kelancaran kegiatan ekonomi dan masyarakat lainnya.

Banyak jenis kendaraan pedalaman yang dikenal di Kalbar antara lain sampan/perahu, bandung, tongkang dan beberapa jenis kendaraan lainnya baik bermesin maupun tidak. Akan tetapi jumlah kendaraan ini dari tahun ke tahun semakin berkurang. Ini karena dampak dibukanya jalan-jalan darat menuju pelosok-pelosok Kalbar. Keadaan ini memerlukan penanganan secara simultan mulai dikembangkan sistem transportasi sungai sebagai integral dari sistem transportasi secara keseluruhan.

Dalam rangka menyusun sistem transportasi air yang terintegratif (terpadu) dengan moda transportasi lainnya sepanjang koridor Kapuas, dilakukan studi penyusunan Strategi Pengembangan Sistem Transportasi Air di Koridor Kapuas. Kawasan yang termasuk dalam koridor kapuas meliputi Kota Pontianak dan empat kabupaten yaitu Pontianak, Sanggau, Sintang dan Pustusibu. Wilayah-wilayah tersebut terkait dalam suatu jaringan transportasi khususnya terlintas Sungai Kapuas.

Transportasi air memiliki peran yang sangat penting di beberapa wilayah Indonesia yang memiliki wilayah perairan yang luas terutama pada daerah-daerah pedalaman yang tidak dapat terjangkau dengan transportasi darat. Pada saat ini perkembangan transportasi air mengalami penurunan pengguna akibat perkembangan transportasi darat yang pesat. Luas

perairan yang dimiliki Indonesia seluas 7,9 km² bisa menjadikan Indonesia sebagai negara dengan basis kekuatan pelayaran kerakyatan untuk mengembangkan ekonominya. Namun sayangnya pelayaran Indonesia ini mendorong kekurangan devisa yang masuk disebabkan pembayaran ongkos pengiriman kepada perusahaan yang dimiliki oleh negara lain. Kekurangan ini menjadi kendala bagi perkembangan pelayaran di Indonesia.

Sistem transportasi air tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi umumnya, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dimiliki oleh daerah dan mempunyai proses perkembangan wilayah yang hendak memperluas jangkauan pemasaran dan pelayanan dalam menunjang berbagai sektor kegiatan sosial ekonomi di setiap titik serta merangsang timbulnya aktivitas-aktivitas baru dalam perekonomian daerah. Sistem lalu lintas sungai dan antar pulau di Indonesia merupakan salah satu sistem transportasi yang secara tradisional digunakan untuk berbagai kepentingan baik dari pedalaman (rural) menuju muara sungai dan selanjutnya akan disambung dengan lalu lintas kapal skala kecil antar pulau.

Dalam perencanaan, akan dilakukan perbaikan infrastruktur dan sarannya hingga pelayanan rakyat dapat kembali bangkit dan menjadi transportasi andalan masyarakat pada wilayah-wilayah yang aksesibilitas ke wilayah lain harus melalui sungai. Perkembangan transportasi darat dan transportasi air tidak selamanya merupakan suatu persaingan hal ini disebabkan adanya beberapa wilayah yang tidak dapat terjangkau dengan transportasi darat yaitu pada daerah-daerah pedalaman melihat letak daerah-daerah yang masih berupa kepulauan-kepulauan kecil. Banyak sungai yang mengalami pengeringan di musim kemarau sehingga tidak dapat dilayari sedangkan kondisi jalan darat banyak yang rusak diakibatkan beban berlebih yang diterima oleh jalan. Transportasi air banyak diandalkan bagi kalangan industri dan pertanian untuk membawa barang dagangan ke daerah-daerah pedalaman. Permasalahan lain yang muncul adalah menurunnya jumlah angkutan penumpang maupun barang dari tahun ke tahun. Penyelenggaraan transportasi air pedesaan di Indonesia masuk dalam sektor Pelayaran rakyat yang pelaksanaannya diatur dalam beberapa undang-undang atau peraturan dari pusat untuk memberikan arahan operasional di lapangan.

Akibat menurunnya angkutan penumpang maupun barang dari tahun ketahun mengakibatkan transportasi air yang pada awalnya memiliki izin usaha angkutan penumpang maupun barang, beralih mengangkut BBM subsidi dan non subsidi. Peralihan fungsi transportasi air ini tentunya menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, karena dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBM tentunya pengusaha angkutan harus memiliki izin usaha pengangkutan BBM sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

Gas Bumi mengatur Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dan Permen ESDM No 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan melalui dua bentuk kegiatan usaha, yakni Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi, sedangkan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan tersebut, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah, peraturan menteri, keputusan yang dibuat Gubernur/Walikota, maupun peraturan lainnya menjadi peluang bagi para pejabat yang bersangkutan untuk memanfaatkannya. Akibatnya, para pengusaha tersebut harus melalui prosedur perizinan yang panjang, berbelit-belit, biaya yang tinggi, bahkan tidak jarang ditemui tumpang tindih kewenangan antara pejabat yang satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi ketegangan hubungan.

Agar pendistribusian dan pengangkutan hasil olahan minyak bumi lancar dan tidak merugikan pengusaha yang hendak mengajukan izin usaha pengangkutan tersebut, maka prosedur perizinan pengangkutan hasil olahan migas seharusnya disederhanakan. Praktek birokrasi yang seperti ini seharusnya ditiadakan, jika tidak maka akan mengurangi kredibilitas pemerintah serta merugikan bangsa dan Negara. Akibat dari sulitnya mendapatkan izin usaha pengangkutan tersebut banyak pengusaha yang memilih jalan pintas tanpa melalui prosedur yang telah di atur dalam undang-undang terkait.

Sebagai salah satu contoh yang terjadi di daerah Kabupaten Sintang, pengusaha-pengusaha memanfaatkan alat angkut tradisional seperti motor bandong untuk mengangkut hasil olahan minyak bumi seperti solar dan bensin ke daerah-daerah pedalaman kabupaten Sintang.

Kabupaten Sintang terletak yang di wilayah timur provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 14 kecamatan dan dilalui oleh 2 sungai besar yaitu sungai kapuas dan melawi. Kedua sungai tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai prasarana transportasi air, terutama dalam mendukung prasarana transportasi darat. Sungai Kapuas melalui kecamatan ketungau hilir, kelam permai, binjai hulu, sintang, tempunak sampai ke sepauk sedangkan sungai melawi melalui kecamatan ambalau, serawai, dedai sampai ke sintang. Anak sungai kapuas yaitu sungai ketungau melalui kecamatan ketungau hulu,

ketungau tengah dan ketungau hilir sedangkan anak sungai melawi yaitu sungai kayan melalui kecamatan kayan hulu sampai ke kecamatan kayan hilir.

Motor Bandong adalah alat transportasi vital yang mengangkut Orang/penumpang, barang-barang dan Bahan Bakar Minyak ke daerah pedalaman kabupaten Sintang. Sebagai salah satu alat transportasi utama di daerah pedalaman Kabupaten Sintang, sering kali motor Bandong di jadikan alat bagi para pengusaha-pengusaha untuk melakukan pengangkutan BBM. Dari data yang di peroleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang terdapat 67 Motor Bandong yang masih aktif beroperasi di daerah ini. dari 67 motor bandong yang masih aktif, terdapat 46 motor bandong yang beroperasi tanpa dilengkapi izin pengangkutan BBM sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran¹.

Angkutan sungai di Kalimantan Barat pada umumnya dan di Kabupaten Sintang pada khususnya dimiliki oleh orang perorang bukan oleh perusahaan. Meskipun dari orang-perorang tersebut mendirikan perusahaan angkutan sungai, namun pengaruh perorangannya tetap menonjol. Angkutan motor dibeli atau dipesan secara tunai dengan menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan pinjaman bank. Ternyata pihak bank tidak dapat menerima motor air yang terbuat dari kayu sebagai jaminan Bank. Itulah sebabnya untuk membuat 1 kapal bervariasi tergantung dana yang dimiliki oleh si pembeli. Bagi pembeli yang memiliki modal cukup, pembuatan motor air bisa cepat. Namun bagi pembeli yang tidak memiliki modal cukup, maka pembuatan kapal menyesuaikan dengan dana yang diberikan kepada pembuat kapal.

Kapal baru seperti Motor Bandong sebelum dioperasikan harus didaftarkan terlebih dahulu ke Syahbandar untuk mendapatkan Syarat Ukur. Surat ukur memuat ukuran fisik kapal, data mesin dan kelayakan kapal secara keseluruhan. Berdasarkan surat ukur ini diterbitkan Sertifikat Kesempurnaan Kapal.

Ijin trayek diberikan kepada pemilik kapal apabila telah melengkapi :

- a. Sertifikat kesempurnaan kapal
- b. Ijin Usaha
- c. Rekomendasi dari Kepala Desa dimana trayek akan melewati desa tersebut
- d. Rekomendasi dari Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Pedalaman (GAPASDAP)

Apabila ijin trayek telah dimiliki, maka motor bandong dapat dioperasikan sesuai dengan trayek yang diijinkan. Motor air dioperasikan/dibawa oleh Pemilik sendiri atau

¹ Hasil wawancara dengan kepala dinas perhubungan kabupaten sintang

diserahkan ke Pengemudi (juragan). Juragan motor bandong harus memiliki Surat Tanda Kecakapan Nakhoda (seperti SIM bagi pengemudi kendaraan bermotor di darat) yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

Pada umumnya, setiap motor bandong hanya dapat melayani 1 round-trip selama satu hari. Di Sintang, untuk Sintang menuju ke Nanga Ketungau Hilir maupun Nanga Ketungau Hilir-Sintang, mulai subuh dan pagi hari, kapal motor meninggalkan desa) dan tiba di Sintang jam 10:00, selanjutnya siang hari mereka kembali lagi ke desa.

Pengoperasian motor bandong sehari-hari adalah sebagai berikut: pemilik motor bandong menyerahkan motor bandongnya kepada sopir/juragan. Pendapatan yang diperoleh sopir/juragan pada hari itu diserahkan kepada pemilik. Selanjutnya pemilik memberi upah kepada sopir maupun awak kapal. Dermaga yang berfungsi untuk turun naik penumpang atau barang baik di Sintang, maupun di Sintang menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan.

Di Sintang ada 2 dermaga yang masih digunakan, dimana ukuran dan lokasinya dicantumkan pada tabel 1 :

Tabel 1 Ukuran Dermaga Angkutan Sungai di Sintang

No	Nama Dermaga	Ukuran	Konstruksi
1	Sungai Ringin	36 x 12 meter	Ferro Coment
2	Sungai Durian	40 x 12 meter	Ferro Coment

Dermaga yang berada di sepanjang tepian sungai, dibangun dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Kondisi dermaga ini memprihatinkan karena konstruksinya dari kayu dan minimnya dana untuk pemeliharaan.

Sejak tahun 2001, kewenangan penanganan angkutan air menjadi tanggung jawab kabupaten/kota dimana angkutan air itu beroperasi. Tahun-tahun sebelumnya, angkutan air ditangani oleh kantor Wilayah Perhubungan (kanwil perhubungan) Tingkat-I Kalimantan Barat, yaitu Seksi Lalulintas, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Seksi LALA ASDP).

Dengan semangat otonomi daerah, pelimpahan wewenang mulai diserahkan kepada masing-masing kabupaten/kota. Dengan demikian di tingkat Pemerintah Kota atau Kabupaten, Dinas Perhubungannya juga memiliki Seksi yang menangani lalulintas sungai dan penyeberangan. Karena era otonomi telah berlangsung, kenyataan di lapangan masih terdapat dualisme kewenangan antara pemerintah Kota dengan Pemerintah provinsi.

Dalam kenyataannya masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan, di mana instansi vertikal (pemerintah pusat) menyatakan bahwa mereka masih memiliki kewenangan untuk memberikan izin trayek/izin operasional bagi kapal pedalaman lintas kabupaten/kota, sementara itu pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat juga menyatakan bahwa pemberian izin tersebut adalah kewenangan pemerintah provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan pengangkutan Bahan Bakar Mintak yang dilakukan oleh motor bandong di Kabupaten Sintang, pelaku usaha wajib mendapatkan izin usaha pengangkutan seperti yang tercantum dalam pasal 25 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 Tentang persyaratan dan pedoman teknis pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan, badan usaha pemegang izin usaha pengangkutan minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LG, LPG, bahan bakar lain dan hasil olahan dengan sarana angkutan darat dan/atau air, wajib terlebih dahulu melengkapi perizinan di bidang transportasi dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan dalam pasal 26 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 Tentang persyaratan dan pedoman teknis pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi di jelaskan mengenai kewajiban badan usaha pemegang izin usaha yaitu :

- a. Menjamin dan bertanggungjawab atas standar mutu minyak bumi, bahan bakar minyak, LPG, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan hasil olahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh menteri dan atau kesepakatan selama dalam pengangkutan.
- b. Menjamin dan bertanggungjawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan untuk memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.
- d. Memiliki fasilitas dan sarana alat angkut yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk perubahannya.
- e. Menjalankan penugasan/penunjukan dari materi untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan bahan bakar minyak di dalam negeri.

- f. melaporkan kepada menteri melalui Direktur jenderal dengan tembusan kepada kepala badan pengatur mengenai kegiatan pengangkutan Minyak dan Gas Bumi secara periodik setiap 1(satu) bulan sekali, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM sering terjadi pelanggaran terhadap izin pengangkutan BBM yang terjadi di Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh Motor Bandong. Kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang merupakan salah satu penyimpangan yang kerap terjadi, dimana penyalahgunaan pengangkutan atau niaga adalah kegiatan pengangkutan dan/atau tata niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang dikenakan terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan Hasil Olahan dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan pencabutan izin usaha, apabila :

- a. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan.
- c. Tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan.
- d. Apabila setelah beroperasi tidak melakukan kegiatan yang berarti secara terus menerus selama 2 (dua) tahun setelah diberikan Izin Usaha.

Permasalahan

Bagaimana prosedur perizinan pengangkutan bahan bakar minyak menurut Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi ?

Pembahasan

Administrasi negara dapat diartikan sebagai apa yang dilakukan pemerintah atau oleh instansi, mulai dari perencanaan hingga tahap evaluasi, demikian seterusnya. Kegiatan administrasi negara ini juga termasuk kegiatan menyerap aspirasi masyarakat, mengolah data/informasi, dan menyampaikannya kepada *policy makers*, serta mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan publik. Demikian pentingnya administrasi negara, sehingga muncul anggapan bahwa baik buruknya kinerja pemerintah atau suatu instansi pemerintah dapat dilihat pertama kali dengan melihat bagaimana pemerintah atau instansi

pemerintah tersebut mengadministrasikan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan yang diembannya.

Birokrasi pada dasarnya adalah tipe pengelolaan organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi dalam skala luas dengan mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis sehingga semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.² Oleh karena itu, administrasi negara memainkan peran pokok utama dalam konteks negara modern. Perubahan yang seharusnya dilakukan tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga rutinitas administrasi pemerintahan sebagai pelaksana terakhir roda kekuasaan. Dalam kaitan ini, reformasi tata kelola negara menjadi kata kunci dalam perwujudan aspirasi demokrasi dan tujuan bernegara.

Pada era globalisasi saat ini, sistem administrasi negara sering dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, serta menjunjung tinggi hukum dalam arti yang sebenarnya. Di era ini, birokrasi dalam layanan perijinan memiliki peranan yang sangat menentukan. Menurut Radius Prawiro, dewasa ini hampir tidak ada satupun bidang usaha yang tidak membutuhkan izin dari satu atau beberapa instansi pemerintah.³ Dengan adanya campur tangan pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan mengakibatkan aktivitas warga masyarakat yang dikendalikan oleh birokrasi pemerintah. Sehingga izin merupakan instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan, mengemudikan, dan mengendalikan aktivitas warga masyarakat ke arah rencana yang ditetapkan. Izin merupakan suatu bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Pengangkutan hasil olahan minyak bumi, termasuk dalam kegiatan usaha hilir migas. Terkait dengan Kegiatan Usaha Hilir, sesuai yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, menurut Pasal 5 PP No. 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu, penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan jenis BBM tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Sehingga dalam hal ini Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dapat melakukan

² Ahmad Gunaryo, *Hukum, Birokrasi, dan Kekuasaan di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Research Institute (WRI): 2001), halaman 81

³ Ibd hal 80

penunjukan, baik penunjukkan langsung maupun dengan lelang kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian kebutuhan BBM tertentu.

Kegiatan Usaha Hilir tersebut dilaksanakan dengan izin usaha. Pengertian izin usaha menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba. Dalam kegiatan usaha migas ini, pembinaan dilaksanakan oleh Pemerintah dengan cermat, transparan, dan adil. Sedangkan pengawasan dilaksanakan oleh departemen yang bidang tugas dan kewenangannya di bidang minyak dan gas bumi atau departemen yang terkait. Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur. Fungsi Badan Pengatur adalah melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

Menurut Pasal 2 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, bahwa prosedur perizinan kegiatan usaha pengangkutan hasil olahan minyak bumi Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Oleh karena itu, setiap Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Hilir harus memiliki izin usaha terlebih dahulu. Terkait dengan izin usaha tersebut diatur dalam Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005.

Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap. Namun, dalam hal permohonan yang diajukan tersebut ditolak, maka Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan. Persyaratan administratif dan teknis yang sudah lengkap dari Badan Usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Migas.

Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan Dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, dalam rangka klarifikasi terhadap data administrasi dan teknis serta kinerja perusahaan, Badan Usaha melakukan presentasi. Peninjauan lokasi dilakukan untuk pemeriksaan kesesuaian data administrasi dan informasi mengenai rencana Badan Usaha. Direktorat Jenderal

Migas menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk persetujuan/ penolakan Izin Usaha Sementara. Direktur Jenderal wajib menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administratif dan data teknis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilaksanakannya presentasi dan diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar dan/atau peninjauan lokasi. Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha Sementara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui. Persetujuan tersebut kemudian oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan kepada Menteri dan/atau Badan Pengatur.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha hilir tersebut, khususnya dalam pengangkutan hasil olahan minyak bumi, lembaga perizinan menjadi sangat penting dalam rangka mengarahkan seluruh aktivitas pengusaha industri di bidang migas. Untuk itu, birokrasi layanan perijinan memiliki peranan yang sangat menentukan. Namun, dengan kompleksnya prosedur dan persyaratan dalam pengajuan izin usaha migas tersebut, tidak jarang dapat dimanfaatkan oleh pejabat yang bersangkutan untuk kepentingan pribadinya. Dalam pengurusan perizinan sering ditampilkan adanya pengisian formulir berlembar-lembar, prosedur yang sangat rumit dan panjang, memakan waktu yang lama dengan persyaratan yang cukup banyak. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh pejabat yang bersangkutan untuk menekan pengusaha yang memerlukan izin.

Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan tersebut, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah, peraturan menteri, keputusan yang dibuat Gubernur/Walikota, maupun peraturan lainnya menjadi peluang bagi para pejabat yang bersangkutan untuk memanfaatkannya. Akibatnya, para pengusaha tersebut harus melalui prosedur perizinan yang panjang, berbelit-belit, biaya yang tinggi, bahkan tidak jarang ditemui tumpang tindih kewenangan antara pejabat yang satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi ketegangan hubungan.

Agar pendistribusian dan pengangkutan hasil olahan minyak bumi lancar dan tidak merugikan pengusaha yang hendak mengajukan izin usaha pengangkutan tersebut, maka prosedur perizinan pengangkutan hasil olahan migas seharusnya disederhanakan. Praktek birokrasi yang seperti ini seharusnya ditiadakan, jika tidak maka akan mengurangi kredibilitas pemerintah serta merugikan bangsa dan Negara.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik wajib dipraktekkan agar tujuan negara tercapai. Untuk itu reformasi dan pengawasan dalam berbagai aspek sistem administrasi negara secara taat asas dan ketat sepatutnya dilaksanakan. Reformasi harus meliputi area perubahan sebagai berikut:

1. Kelembagaan (organisasi). Organsiasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).

2. Budaya organisasi. Menanamkan agar birokrasi dan individu organisasi memiliki integritas dan kinerja yang tinggi
3. Ketatalaksanaan. sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.
4. Regulasi birokrasi. Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusifitas.
5. Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

Kesimpulan

Bahwa prosedur perizinan pengangkutan bahan bakar minyak menurut Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi dalam kaitannya untuk mendapatkan izin usaha yaitu badan usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri (dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) melalui Direktur Jenderal (yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi) dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.

Daftar Pustaka

- Ahmad Gunaryo, *Hukum, Birokrasi, dan Kekuasaan di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Research Institute (WRI): 2001
- Bachsan Mustafa, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Baharuddin Lopa, 1984, *Hukum Laut, Pelayaran dan Perniagaan*, Alumni, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 1977, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Faisal Basri, 2002, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Erlangga
- Fuady Munir, 2001, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasibuan, (2001). *Kajian Manfaat dan Permasalahan Kredit Bersubsidi untuk UMKM*. (Thesis S2), Bidang keahlian Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Desa Fakultas Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kotler, Phillip, 1995, *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian*, Edisi Kedelapan, Salemba Empat, Jakarta.
- , 2001, *Manajemen Pemasaran di Indonesia*, Buku 2, Salemba Empat, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajat 2003, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta
- Lexy J. Maliong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Karya, 1989
- Nasution dan Thomas, 1980, *Buku Panduan Penuntut Membuat Disertasi, Thesis, Skripsi, Report dan Paper*, Bandung, CV. Jemmars.
- Nugroho, Hanan. 2004. *Subsidi BBM bukan uang keluar, tapi mesti ditekani*. Bisnis Indonesia, 2 Desember 2004
- Manggara Tambunan, (2004). *Melangkah Ke Depan Bersama UKM*. Makalah pada Debat Ekonomi ESEI 2004, Jakarta Convention Centre 15-16 September 2004.
- Milton H. Spencer & Orley M. Amos, Jr., *Contemporary Economics*, Edisi ke-8, , Worth Publishers, New York
- M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, Edisi ke-5, 2003, BPFE, Yogyakarta
- Riduan, 2007, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung, Alfabeta.
- Sadu Wasistiono, dkk., 2002, *Pengelolaan Sektor Perhubungan Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Pusat Kajian Pemerintah STPDN, Jakarta.
- Situmorang, Johnny W., (2005). *Pembangunan Nasional, Investasi, dan UKM*
- Tambunan, Tulus (2003), *Perkembangan UKM dalam Era AFTA: Peluang, Tantangan, Permasalahan dan Alternatif Solusinya*. Paper Diskusi pada Yayasan indonesia Forum.

Wayan Suarja, A.R. dan Teuku Syarif, (2008). *Pemberdayaan UMKM di Bawah Bayang-Bayang Kenaikan Harga BBM*. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKM dan Koperasi, Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta.

Zamroni. 2010. *Pengaruh Pengurangan Subsidi BBM terhadap UMKM* . Jakarta : LIPI.